

BAB V

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Kesimpulan

Proses pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pendidikan dasar tingkat sekolah dasar di Kabupaten Banyumas sesuai dengan permendiknas nomor 15 tahun 2010 belum berjalan dengan maksimal. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa sekolah dasar di Kabupaten Banyumas yang belum memenuhi indikator-indikator dari SPM Pendidikan Dasar. Dari beberapa aspek yang telah dibahas pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan:

1. Implementasi Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumas jika dilihat dari *input*, proses dan *output* adalah sebagai berikut.
 - a. *Input*: Kesiapan pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar nomor 15 Tahun 2010 sudah dapat dipenuhi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas hal ini dibuktikan dengan diadakannya pelatihan-pelatihan yang ditujukan kepada pengawas, kepala sekolah serta guru terkait dengan pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar selain itu untuk masalah sarpras maupun dana pendukung Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar juga sudah dapat terpenuhi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Sudah ada petunjuk teknis dalam pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumas yaitu PP nomor 19 tahun 1995, permendiknas no 15 tahun 2010, serta Surat Keputusan Bupati nomor 420/40/tahun 2016. Untuk sarana

prasarana pendukung pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumas sudah dapat dipenuhi dengan baik, terdapat sarpras berupa laptop, PC, serta printer yang membantu mempermudah pelaksanaan SPM pendidikan Dasar.

- b. Proses: Dalam Pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumas, rencana dan pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar belum dapat berjalan dengan sesuai hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa indikator SPM Pendidikan Dasar yang belum terpenuhi di beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas
- c. *Output*: Output dari SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumas, terkait dengan pemenuhan 21 indikator yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan Satuan pendidikan belum dapat dipenuhi dengan maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari belum terpenuhinya indikator-indikator SPM Pendidikan Dasar di beberapa Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas. Indikator-indikator yang belum terpenuhi tersebut sebagian besar menyangkut masalah sarpras seperti kriteria meja kursi yang belum sesuai serta jumlah ruang kelas yang tidak sesuai dengan rombongan belajar.

Dari penjelasan diatas terkait dengan implementasi permendiknas nomor 15 tahun 2010 tentang SPM Pendidikan Dasar di kabupaten Banyumas dapat disimpulkan bahwa SPM Pendidikan Dasar sudah berjalan namun belum dapat berjalan maksimal, sesuai dengan ketentuan yang ada, hal

tersebut dapat dilihat dengan belum terpenuhinya unsur proses serta *output*.

2. Komunikasi dalam pelaksanaan SPM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas, terjalin antara Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas kepada pihak sekolah dasar yang diwakili oleh kepala sekolah yang dijemput oleh UPK setempat, . Sosialisasi dalam tersebut dilakukan dalam bentuk diklat-diklat dimana sasaran dari diklat tersebut ialah pengawas sekolah, kepala sekolah serta guru pengajar. Selanjutnya untuk masalah koordinasi menyangkut pelaksanaan SPM pendidikan dasar dapat berjalan dengan baik, koordinasi dari pihak sekolah dengan Dinas Pendidikan diperantarai oleh UPK. Proses komunikasi mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya dimana seharusnya sosialisasi dilaksanakan lebih awal yaitu pada saat Permendiknas No. 15 Tahun 2010 mulai diberlakukan, karena keterlambatan tersebut sehingga pada saat ini implementasi Permendiknas No. 15 Tahun 2010 tentang SMP Pendidikan Dasar masih dalam tahap sosialisasi. Dari unsur komunikasi, keterlambatan pelaksanaan sosialisasi mempengaruhi pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumas dimana karena keterlambatan proses sosialisasimenyebabkan implementasi SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumas belum dapat berjalan dengan maksimal.
3. Sumber daya yang tersedia pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan SPM pendidikan dasar dari segi jumlah sudah memenuhi kriteria yang ditentukan, namun dari segi kompetensi masih

terdapat aktor yang belum menguasai materi SPM pendidikan dasar. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaan SPM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas ialah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas, tim dari Kemendikbud, Kemendiknas, pengawas serta beberapa SKPD terkait. Dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas aktor yang terlibat dalam pelaksanaan SPM pendidikan dasar yaitu Bina Program, Pendidikan Dasar serta Bidang PPTK, serta beberapa anggota dari SKPD terkait. Sedangkan untuk sumber daya finansial tidak ditemukan kendala, dana dalam pemenuhan SPM pendidikan dasar 100% berasal dari dana pemerintah. Yaitu berasal dari hibah, APBN, APBN Provinsi Jawa Tengah dan APBN. Selain itu, dinas pendidikan juga berencana untuk menggandeng pihak swasta lewat program *CSR (Corporate Social Responsibility)*. Dari unsur Sumber Daya yang sudah dijelaskan tersebut, faktor SDM khususnya yang berkaitan dengan kompetensi aktor pelaksana kebijakan yang belum menguasai materi SPM Pendidikan Dasar, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan belum maksimalnya implementasi SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumas.

4. Disposisi dalam pelaksanaan SPM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas, implementor kebijakan (Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas) sudah profesional dalam menjalankan kebijakan SPM pendidikan dasar tersebut, terkait dengan komitmen para aktor pelaksanaan kebijakan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa aktor-aktor tersebut telah memiliki komitmen dalam

mangimplementasikan kebijakan SPM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas. hal tersebut dapat dilihat dari besarnya minat serta antusias para implementor dalam diklat-diklat yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyangkut pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar.

5. Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan SPM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas belum ada SOP yang jelas yang dibuat oleh Dinas pendidikan Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan sosialisasi SPM pendidikan dasar, SOP yang ada hanya mengacu kepada Permendiknas Nomor 15 Tahun 2015 terkait dengan indikator-indikator yang harus dipenuhi, serta Surat Keputusan Bupati terkait dengan tugas dari Tim pengawas dan Tim teknis. Sudah terdapat struktur organisai dalam pelaksanaan SPM pendidikan dasar di Kabupaten Banyumas, dimana dalam pelaksanaannya Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas bertanggung jawab langsung terhadap SD/MI serta SMP/MTS, masing-masing sekolah tersebut harus melaporkan kondisi SPM di sekolahnya masing-masing kepada dinas pendidikan. Dalam proses koordinasi antara pihak sekolah khususnya ditingkat sekolah dasar dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dijembatani oleh UPK setempat. Struktur birokrasi menjadi salah satu penentu keberhasilan implementasi, belum adanya SOP yang jelas terkait dengan segala kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan

implementasi SPM Pendidikan Dasar di Kabupaten Banyumas belum berjalan dengan maksimal.

B. Implikasi

1. Terdapat aktor yang belum menguasai materi SPM dengan baik saat sosialisasi SPM pendidikan dasar yang ditujukan kepada Kepala Sekolah Dasar, *Stakeholder* yang terkait dalam pelaksanaan SPM pendidikan dasar dari Dinas Pendidikan harus lebih menguasai materi tentang SPM pendidikan dasar, agar tidak terjadi salah penyampaian informasi terhadap sasaran kebijakan. UPK setempat harus mengetahui dan paham betul dengan tugasnya sebagai perantara antara pihak sekolah dengan Dinas Pendidikan.
2. Masih banyak Indikator-indikator SPM pendidikan dasar tingkat sekolah dasar yang belum terpenuhi, sehingga perlu adanya ketegasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas terkait dalam pemenuhan indikator-indikator SPM pendidikan dasar. Sehingga nantinya tidak ada toleransi lagi khususnya masalah jumlah siswa dimana jumlah siswa di sekolah favorit cenderung melebihi kuota yang ditentukan di SPM pendidikan dasar.
3. Belum ada SOP yang jelas yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dalam pelaksanaan SPM pendidikan dasar tingkat sekolah dasar, misalnya saja SOP terkait dengan sosialisasi SPM Pendidikan Dasar. Perlu dibuat SOP yang lebih jelas, terperinci dan sistematis terkait dengan aktor serta tugasnya masing-masing dalam pelaksanaan SPM Pendidikan Dasar Tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Banyumas.